RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya telah tersusun Rencana Kerja Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005

DAFTAR ISI

SAMPUL (HALAMAN JUDUL)

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 63

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 66

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 69

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 70

3.3. Program dan Kegiatan 71

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 74

V. PENUTUP

5.1. Catatan Penting 76

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 77

5.3. Rencana Tindak Lanjut 77

LAMPIRAN 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 yang secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan Visi, Misi, (RKPD, RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Bottom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan

rencana pembangunan, Top-Down dan Bottom–Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai acuan/dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah:

1. Menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
3. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

4. Dan dapat bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perindag KUKM di masa akan yang datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian sasaran terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pada Dinas Perindag KUKM adalah mencakup lima sasaran dalam rencana strategis sesuai misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Lingkup Dinas Perindag KUKM adalah :

1. Berkurangnya penduduk miskin.
2. Meningkatnya daya beli masyarakat.
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan.
4. Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa).
5. Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan

Gambaran Umum Capaian Program Prioritas yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

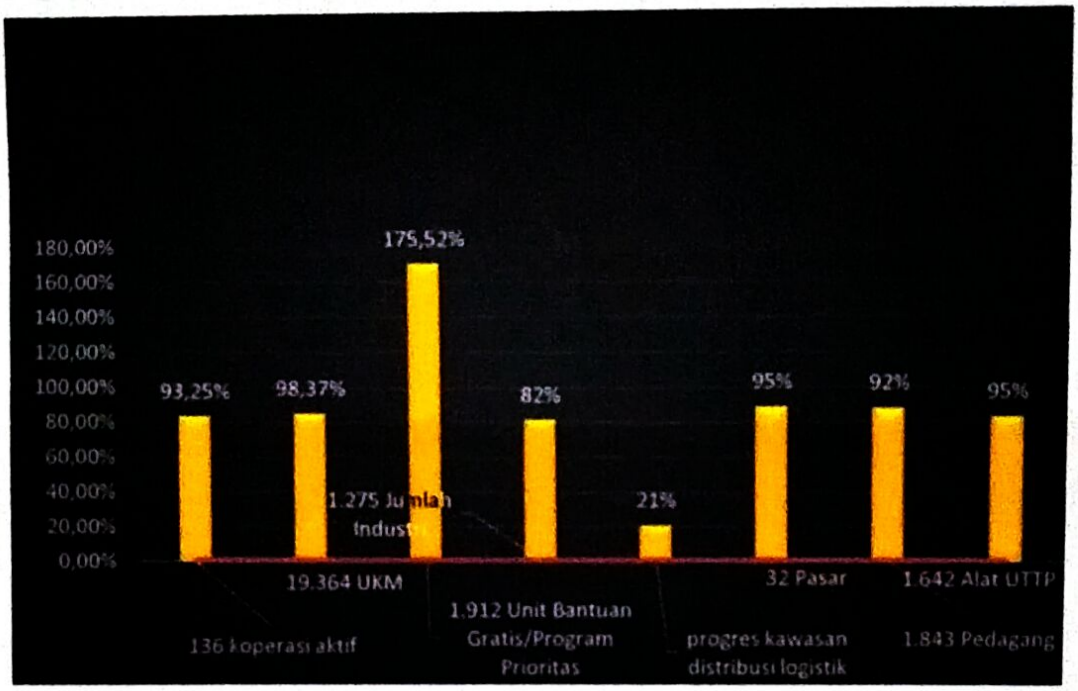

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Lingkup Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi kedalam dua jenis urusan yakni urusan wajib dan urusan pilihan, dan pencapaian kinerjanya diuraikan sebagai berikut :

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Untuk program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena terjadi bencana nasional yaitu pandemik covid-19 pada Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021, adalah sebagai berikut:

   1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi disediakan sebesar Rp. 29.464.000,-

2. **Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Untuk program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Urusan Wajib yang dilaksanakan

Dalam aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perindag KUKM sampai dengan tahun 2021 adalah :

Bidang Koperasi

Secara garis besar pencapaian program dan kegiatan pada Bidang Koperasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

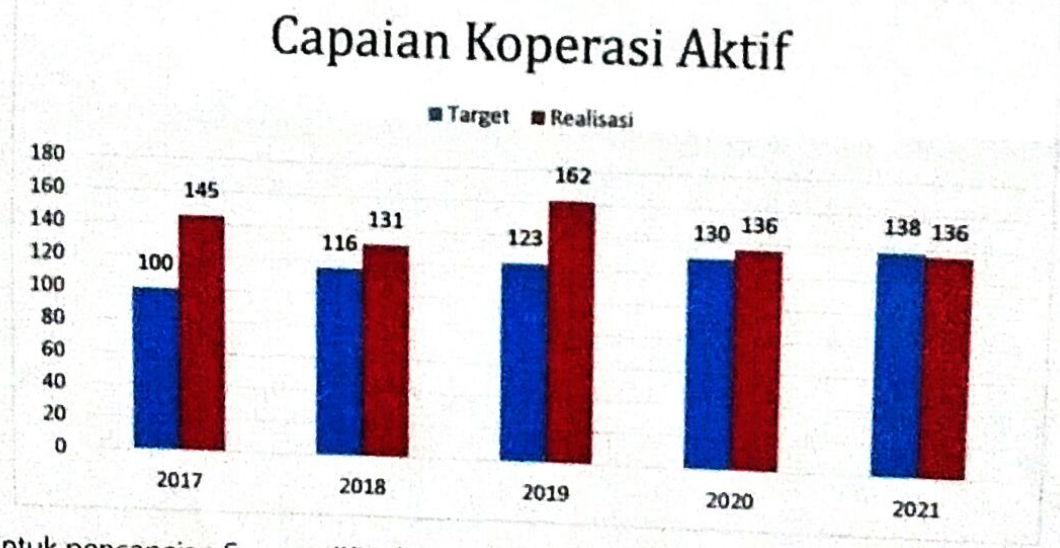

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada table dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi :			
	a. Persentasi Koperasi Aktif	138	136	98
	b. Persentasi Koperasi Sehat	150	89	59

- ✓ Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 136 koperasi dari 165 koperasi yang ada.
- ✓ Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2021 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
- ✓ Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 - 2021

Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	136	145	131	162	136	136
2	Jumlah koperasi	189	189	161	81,48	165	165
3	Persentase koperasi aktif	71,96	76,72	81,37	132	82,42	82,42

Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2016 - 2021

Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kecamatan Benteng						
	Jumlah koperasi aktif	48	57	44	44	47	48
	Jumlah koperasi	86	86	63	63	65	66
	Persentase koperasi aktif	55,81	66,28	69,84	69,84	72,30	72,72
2	Kecamatan Bontoharu						
	Jumlah koperasi aktif	10	10	9	9	10	10
	Jumlah koperasi	12	12	10	10	11	11
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	90	90	90,90	90,90
3	Kecamatan Bontomanai						
	Jumlah koperasi aktif	11	11	10	10	11	10
	Jumlah koperasi	14	14	12	12	13	13
	Persentase koperasi aktif	78,57	78,57	83,33	83,33	83.33	76,92
4	Kecamatan Bontomatene						
	Jumlah koperasi aktif	15	15	16	16	16	16

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18	18
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	88,89	88,89	88,89	88,89
5	Kecamatan Buki						
	Jumlah koperasi aktif	12	12	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	15	15	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	80	80
6	Kecamatan Bontosikuyu						
	Jumlah koperasi aktif	6	6	12	13	12	12
	Jumlah koperasi	7	7	15	16	15	15
	Persentase koperasi aktif	85,71	85,71	80	81	80	80
7	Kecamatan Pasimasunggu						
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim						
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	6	6	4	4	4	4
	Persentase koperasi aktif	66,67	66,67	100	100	100	100
9	Kecamatan Pasimarannu						
	Jumlah koperasi aktif	8	8	9	9	9	9
	Jumlah koperasi	8	8	9	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Takabonerate						
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	10	10
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	10	10
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena						
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	136	145	131	132	136	137
	Total Jumlah koperasi	189	189	161	162	165	166
	Total Persentase koperasi aktif	71,96	76,72	81,37	81,48	82,42	82,53

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.150.000,- dengan capaian output 86,14%. Ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp.30.150.000,- dengan capaian output 86,14 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

   b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 129.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.157.000,- dengan capaian output 100 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 129.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.157.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 86.998.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.978.600,- dengan capaian output 99,97 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 86.998.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.978.600,- dengan capaian output 99,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.
4. Kondisi pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan karena semuanya diarahkan ke penanganan covid-19.
5. Masih rendahnya pelaksanaan ART
6. Adanya tunggakan penerima bantuan
7. Kegiatan usaha tidak berjalan
8. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
9. Terbatasnya tenaga terampil

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindag KUKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;
3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
5. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
6. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi

7. Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
8. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Bidang UKM

Capaian program dan kegiatan pendataan pelaku usaha se Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021 dapat disimpulkan bahwa :

1. **JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH**

Gambaran umum pencapaian jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah se-Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

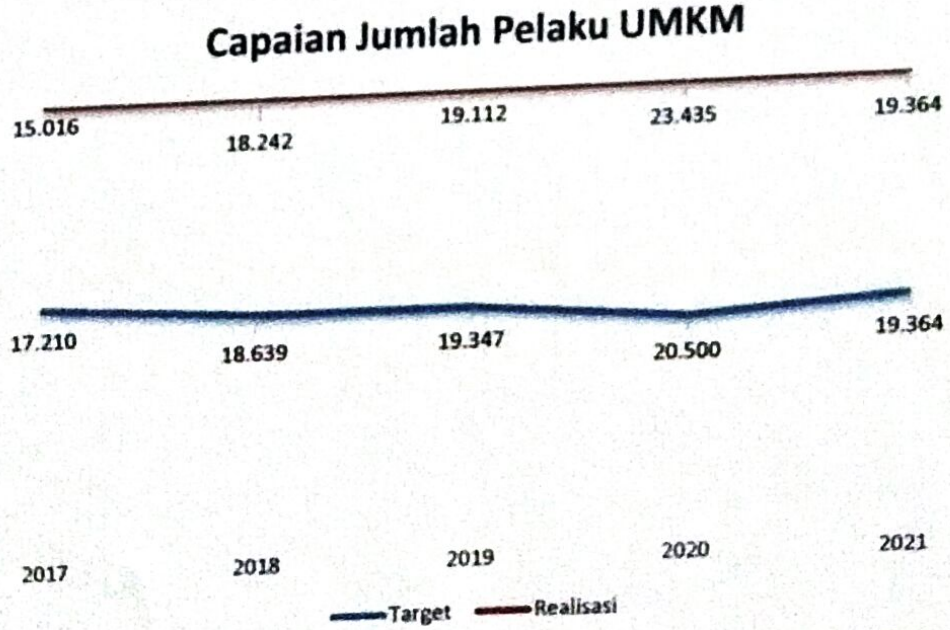

Dalam pencapaian tahun ini, data pelaku UKM meningkat sekitar 5% dari tahun sebelumnya karena banyaknya pelaku usaha yang terdampak covid-19 dari berbagai sektor, baik dari sector pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor lainnya.

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya Kualitas UMKM			
a.	Jumlah UMKM yang produktif	350 UKM	346 UKM	98
b.	Jumlah sentra UKM potensial yang dikembangkan	45 UKM	31 UKM	69

Pada tahun 2021 persentase jumlah Usaha Kecil Menengah yang aktif yaitu 19.364 dan data yang terdaftar di SIKP sejumlah 4.102 UKM. Meski ditengah pandemi namun para pelaku UKM tetap bisa berproduksi dengan bantuan modal usaha yang diberikan.

Pencapaian Program Gratis Bupati Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat dalam gambar grafik sebagai berikut :

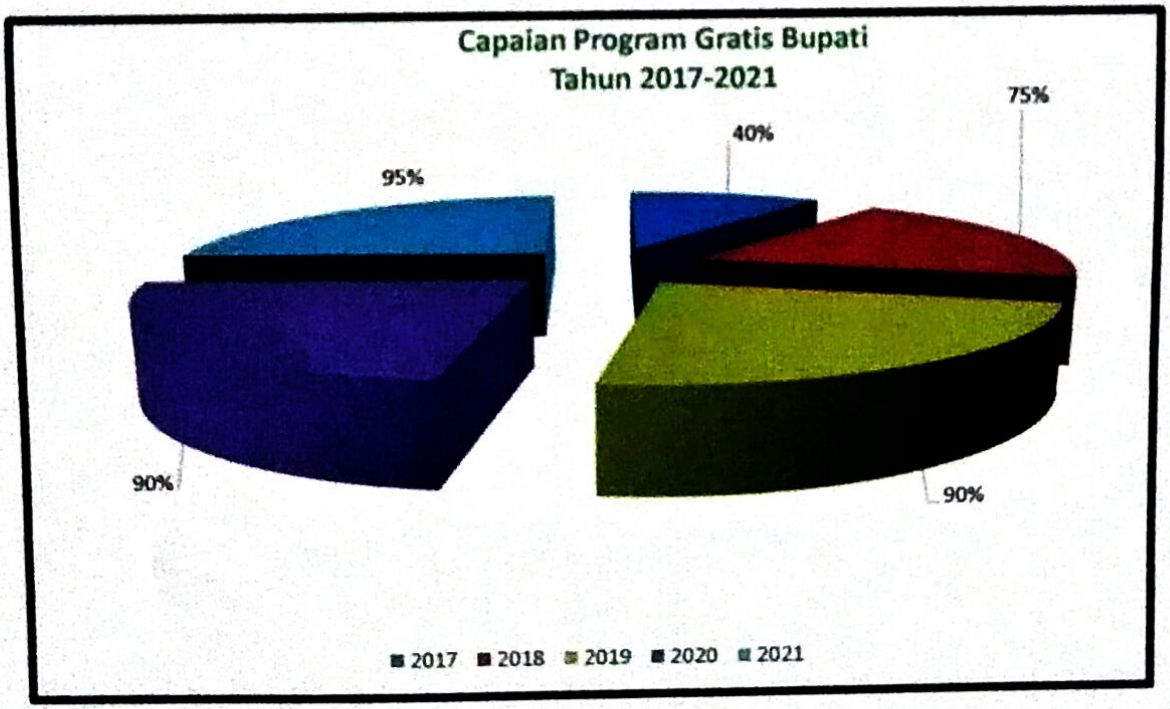

UKM secara keseluruhan, dan pendapatan rata-rata di range Rp. 1.000.000 s/d 5.000.000,- sehingga masih mampu bersaing dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi global, namun di tahun 2021 terjadi pandemi covid-19 sehingga mengalami penurunan omset sekitar 50% dari tahun sebelumnya namun para pelaku usaha kecil dan menengah tetap berproduksi, dan dapat dijelaskan kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Meminjam modal usaha adalah masalah UKM yang utama. Efeknya para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
2. Kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.
3. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.
4. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan channel dalam hal mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun kedepannya adalah :

Dinas Perindag KUKM Bidang Pembinaan UKM terus melakukan program pembinaan dan pengembangan UKM. Berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan. Yaitu penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk UKM, peningkatan kemampuan sentra dan serta pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi.

UKM di Kabupaten Kepulauan Selayar selayaknya mendapat perhatian besar dari Pemerintah, khususnya dari Dinas Perindag KUKM. Sebab di sini terdapat ribuan unit usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 550 orang. UKM secara signifikan telah banyak memberikan konstribusi kepada Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Selain pembinaan yang selama ini di laksanakan oleh Dinas Perindag KUKM bidang pembinaan UKM, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pengembangan wirausaha baru. Bidang pembinaan UKM terus mendorong wirausaha baru agar menjadi lokomotif pengerak perekonomian daerah serta berperan dalam menanggulangi pengangguran dan menghambat urbanisasi.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 624.872.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 622.232.000,- dengan capaian output 99,58 %. Ini dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

   a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 133.072.000,- terealisasi sebesar Rp. 131.472.000,- dengan capaian output 98,79 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 281.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 281.491.600,- dengan capaian output 99,96 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

Sosialisasi Produk-Produk Pemerintah

Bantuan Stimulus

c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 28.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.180.000,- dengan capaian output 98,88 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 181.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 181.088.400,- dengan capaian output 99,66 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

1. Jumlah / Jenis / Pelaku UKM.

I. Rekap Database Pelaku Ukm

JUMLAH KESELURUHAN PELAKU UKM	19.364 ORANG

II. Rekap Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan

Total keseluruhan jumlah penerima bantuan dari tahun 2017-2021 sebanyak 455 kelompok, dengan jumlah unit sebanyak 1.912 unit bantuan peralatan.

Anggaran Pengadaaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2 Kelompok	2 unit
2	Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti	3 Kelompok	20 Unit
3	Pengadaan Mesin jahit	3 Kelompok	12 Unit
4	PengadaanMesin Obras	3 Kelompok	9 Unit
5	Pengadaan Mesin penggiling tepung ikan	1 Kelompok	1 Unit
6	Pengadaan Pertukangan	14 Kelompok	92 unit
7	Pengadaan Mesin Sentri Fugar	4 Kelompok	4 Unit
8	Pengadaan Mesin penggiling Mie	9 Kelompok	27 Unit
9	Pengadaan Mesin Pemeras kelapa	9 Kelompok	9 Unit
10	Pengadaan mesin gula Merah	4 Kelompok	4Unit
	Jumlah	52 Kelompok	180 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2017 Sebesar Rp. 1.506.772.250,- Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Peralatan Masak Memasak	23 Kelompok	427 Unit
2	Pengadaan Mesin Spinner	22 Kelompok	73 Unit
3	Pengadaan Mesin Penggiling Daging	15 Kelompok	30 Unit
4	Pengadaan Mesin Pembuat Roti	22 Kelompok	20 Unit
5	Pengadaan Alat Kacip	21 Kelompok	96 Unit
Jumlah		**103 Kelopok**	**217 Unit**

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,- Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengering	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
Jumlah		**209 Kelompok**	**614 Unit**

Anggaran Pengadaaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp. 1.258.575.000,- Yang Terdiri Dari Tabel Berikut Ini:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	12 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit
8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
Jumlah		**91 Kelompok**	**901 Unit**

Identifikasi permasalahan pada pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelaksanaan ART
2. Adanya tunggakan penerima bantuan
3. Kegiatan usaha tidak berjalan
4. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
5. Terbatasnya tenaga terampil

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindag KUKM, adalah dengan :

1. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan system dan prosedur kinerja organisasi yang professional
2. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
3. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi

4. Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
5. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

Data / Hal-hal lain yang dianggap perlu juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah :

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungaan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa :

   kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.
4. Memfasilitasi kemitraan usaaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

Urusan Pilihan yang dilaksanakan

Dalam aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Dinas Perindag KUKM sampai dengan tahun 2021 adalah :

Bidang Perindustrian

1. **TERBANGUN DAN BERKEMBANGNYA KAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK (BARANG DAN JASA)**

Secara umum progress berkembanganya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

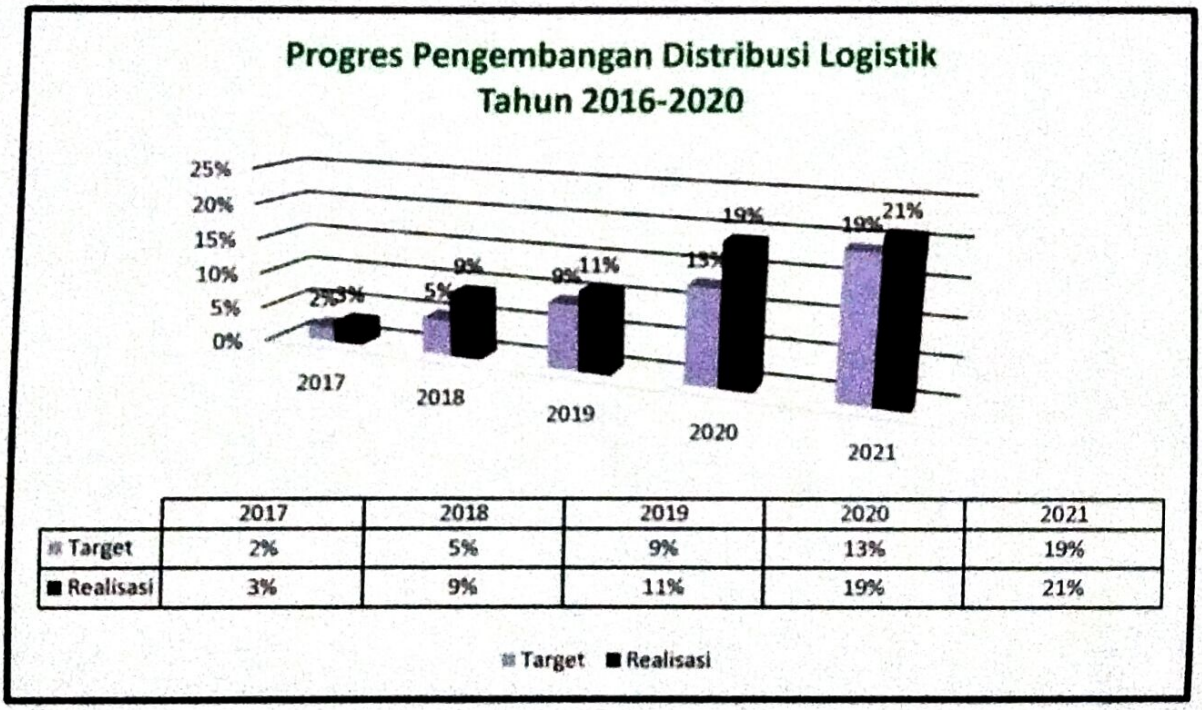

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	2%	5%	9%	13%	19%
Realisasi	3%	9%	11%	19%	21%

Target Realisasi

1. Dukungan regulasi :
   - Perda Kemudahan Investasi, Yakni Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentive dan Kemudahan Penanaman Modal, Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019 tentang Tata cara pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
   - Perda RPIK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 – 2039

- Perda RPIK Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RT RW Kab. Kep. Selayar Tahun 2012-2032
- Perda No. 9 Tahun 2009 tentang RT RW Provinsi Sel-Sel Tahun 2009-2029

2. Pemetaan Kawasan distribusi logistik sudah dibagi menjadi atas kawasan utama di pamatata dan sub kawasan meliputi, kawasan pelabuhan benteng, pelabuhan jampea, pelabuhan kayuadi, pelabuhan bonerate dan kalotoa.
3. Dokumen Perencanaan kawasan sudah dianggarkan propinsi tahun 2022 sebesar Rp. 750.000.000
4. Dokumen Lahan:
   - Sudah ada surat pernyataan masyarakat pemilik lahan/bersertifikat atas nama Pemda dengan luas lahan 4 Ha yang lokasinya berada di Kawasan Utama Pamatata Kec. Bontomatene.
   - Lahan yang belum dibebaskan kepemilikannya seluas 1.200 Ha, lokasinya juga berada di Kawasan Utama Pamatata Kec. Bontomatene.
   - Dalam tahap perencanaan, seluas 2 Ha untuk masing-masing sub kawasan pelabuhan
5. Minat investasi :
   - PT. Pelindo IV makasaar untuk modernisasi pelabuhan
   - PT. Pelayaran Tanto untuk pengangkutan kontener barang keluar masuk selayar
6. Langkah Koordinasi dengan :
   - Dinas perindustrian perdagangan, dan DPR propinsi tentang penganggaran study kelayakan pusat kawasan distribusi logistik
   - Koordinasi dengan PT pelindo IV makasaar untuk pengaktifan kembali distribusi logistik konteiner di Kabupaten Kepulauan Selayar

- Koordinasi dengan PT pelayaran tanto tentang rencana kedatangan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Dan yang menjadi permasalahan pokok yang dapat menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terkendala adanya ketidaksesuaian harga riil dengan penawaran yang diajukan saat dilakukan pembebasan dan keterbatasan anggaran

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian :			
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	50 IKM	48 IKM	96
	b. Persentase Peningkatan Unit usaha Industri Unggulan Daerah	32 IKM	32 IKM	100

- ✓ Jumlah Pelaku IKM sebanyak 1.275 IKM
- ✓ Sentra pengolahan Ikan berlokasi di desa padang kecamatan bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas 1 kelompok binaan.
- ✓ Tahun 2019 sentra pengolahan ikan telah mendapatkan bantuan DAK 1 M untuk pembelian peralatan
- ✓ Tahun 2022 sentra pengolahan ikan mendapat bantuan DAK FISIK sebesar 6,4 M
- ✓ Tahun 2022 sebagai penjunjang kegiatan sentra diberikan DAK Non fisik sebesar 1,7 M (swakelola)

  Tahun 2022 sebagai penununag kegiatan DAK Fisik, Telah dianggarakan Dana pembebasan lahan sebesar 350 juta
- ✓ Pembentukan sentra pengolahan ikan tahun 2018-2019 desa Bonto Sunggu Padang, Kecmatan Bontosikuyu

- ✓ Pembentukan sentra pandai besi tahun 2007 desa bungayya bone lohe Kecamatan Bontomatene
- ✓ Pembentukan sentra pengembangan jambu mente Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur tahun 2021 Sk penetapan sementara diselesaikan
- ✓ Pembentukan sentra gula merah di Desa Majapahit Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021 SK penetapan sementara diselesaikan
- ✓ Pembentukan galeri oleh oleh selayar kerjasama Lsm Econatural dan PASMO Pembinaan dan pelatihan secara konsisten terhadap pelaku industri mikro bidang pengolahan ikan, pengolahan turunan kelapa, legalitas usaha industri, kemasan dan labeling, dan lainnya sejak tahun 2016 – 2022

Namun kendala yang dihadapi adalah :

- ✓ Belum optimalnya pengembangan sub kawasan distrbusi logistik di Kepulauan dan pengembangan kawasan utama dipamatata
- ✓ Masih terbatasnya Ketersediaan SDM Kompetensi
- ✓ Tahun 2022 akan dibangun sentra pengolahan ikan di Desa Padang Kecamatan Bontoharu.
- ✓ Belum meratanya Pengembangan sentra IKM di 11 kecamatan
- ✓ Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca covid 19

2. CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN/JUMLAH IKM

Gambaran umum progres capaian binaan kelompok pengrajin dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

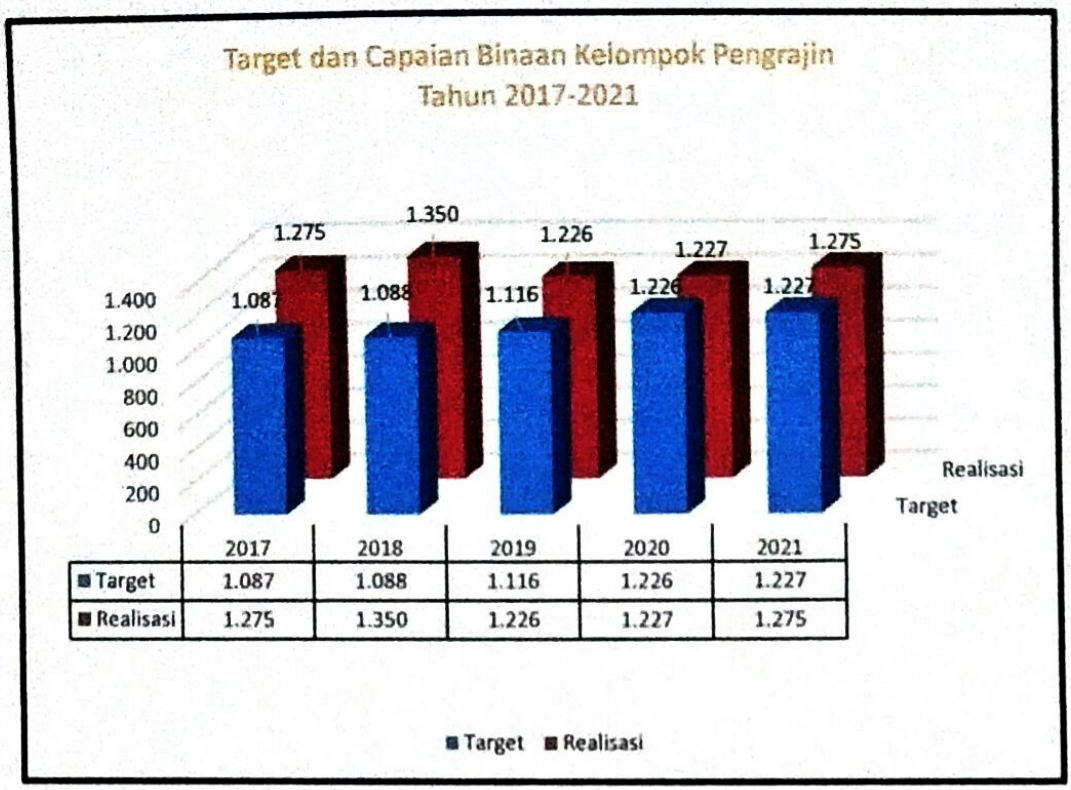

Adapun rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan penghasilan petani khusus pengrajin kopra, meliputi :

1. Membuat regulasi tentang tataniaga kelapa dan turunannya termasuk himbauan mengangkat kearifan lokal tentang pembuatan dan penggunaan minyak kelapa dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan arang tampurung.
3. Pelatihan dan bantuan peralatan pembuatan carbon aktif.
4. Pelatihan dan peralatan pembuatan vco curah.
5. Sosialisasi pentingnya menumbuhkembangkan kearifan lokal daerah tentang pembuatan minyak goreng dari kelapa dalam serta himbauan melalui surat edaran untuk penggunaannya secara massal oleh masyarakat.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan pada tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.484.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.455.989.895,- dengan capaian output 94,11 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 47.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.753.313,- dengan capaian output 99,48 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap tidak mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyabaran dan Perwilayahan Industri

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 182.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 178.113.182,- dengan capaian output 97,76 %. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 76.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.076.200,- dengan capaian output 95,9 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %.

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 109.210.000,- dengan capaian output 99,28 %. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

f. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.837.200,- dengan capaian output 97,67 %. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %. Adapun kegiatannya adalah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %.

3. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 150.631.808,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.992.808,- dengan capaian output 99,57 %. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dianggap mencapai target atau

sasaran yang diinginkan. Adapun kegiatannya adalah Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 150.631.808,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.992.808,- dengan capaian output 99,57 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Bidang Perdagangan

Secara garis besar jumlah pasar yang sudah dibangun di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada table berikut :

1. MENINGKATNYA JUMLAH PASAR

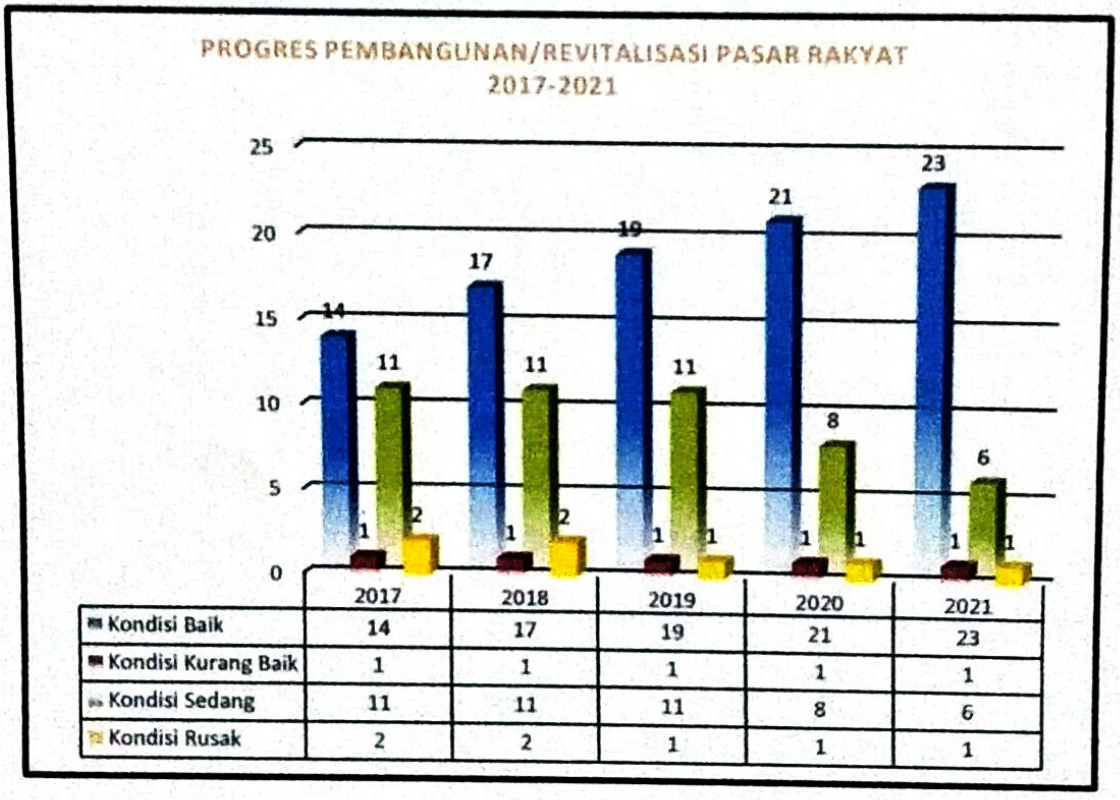

	2017	2018	2019	2020	2021
Kondisi Baik	14	17	19	21	23
Kondisi Kurang Baik	1	1	1	1	1
Kondisi Sedang	11	11	11	8	6
Kondisi Rusak	2	2	1	1	1

Pada tahun 2021 Dinas Perindag KUKM, khususnya Bidang Perdagangan terus melakukan berbagai program secara berkesinambungan terus dijalankan.

Dan sebagai apresiasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indoneisa yaitu dengan diterimanya Tugas Pembantuan pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, dengan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di tujuh kecamatan.

Dana APBN untuk tahun 2018-2021, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebayak 8 (delapan) pasar di 7 kecamatan yakni Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Benteng, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanain dan Kecamatan Bontomatene, tahun 2021 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 1 (satu) kecamatan, yakni :

- ✓ Pasar Rakyat Parangia di Kecamatan Bontomatene dengan anggaran sebesar Rp. 5 milyar.

✓ Pasar Rakyat Batangmata di Kecamatan Bontomatene dengan anggaran sebesar Rp. 4 milyar

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan output sosialisasi pada 70 orang pelaku usaha

Pada tahun 2020 :

- Pembangunan Pasar Desa di Kecamatan Pasimasunggu Timur

Gambar Pasar Kecamatan Pasimasunggu Timur

Ditahun tahun 2019, ada dua pasar kecamatan, yakni :

- Pembangunan Pasar Desa Barugaiya Kecamatan Bontomanai
- Pembangunan Pasar Bonea Kecamatan Benteng

Gambar Pasar Bonea Kecamatan Benteng

Gambar Pasar Barugaia Kecamatan Bontomanai

Ditahun tahun 2018, ada tiga pasar kecamatan, yakni :

- Pembangunan Pasar Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu
- Pembangunan Pasar Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena
- Pembangunan Pasar Desa Bonerate Kecamatan Takabonerate
- Penyerahan hibah Pasar Barugaiya dan Pasar Bonea sekaligus pemberian penghargaan atas partisipasi pembangunan pasar oleh pihak Kementrian Dalam Negeri.

2. PERSENTASE MENINGKATNYA JUMLAH PEDAGANG

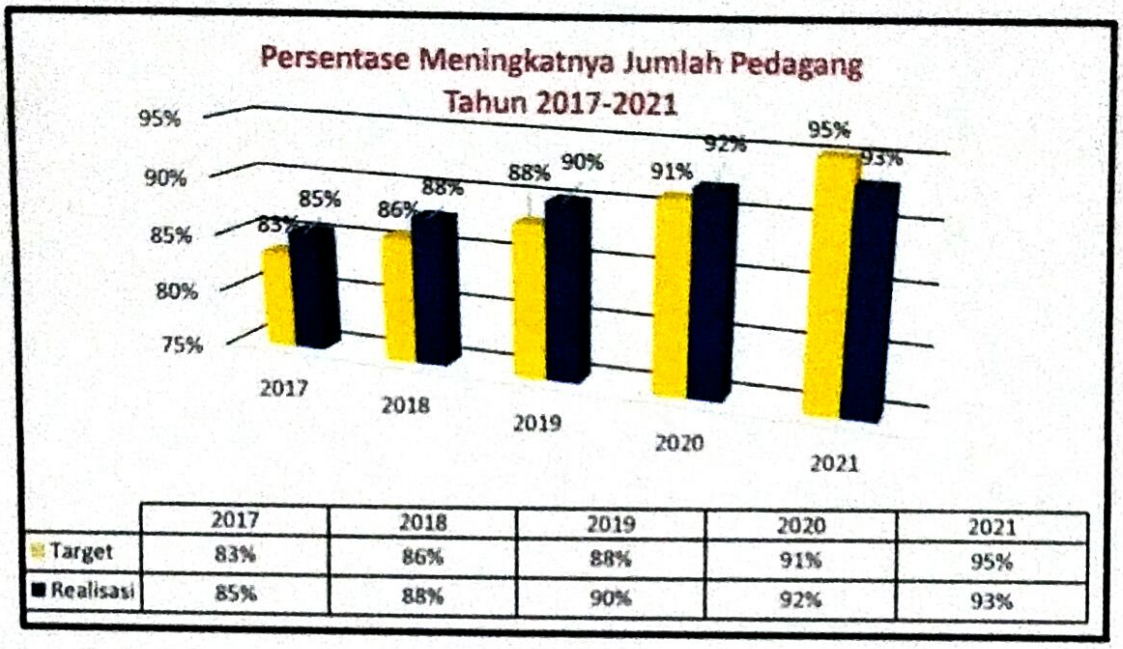

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	83%	86%	88%	91%	95%
Realisasi	85%	88%	90%	92%	93%

Jumlah pedagang terus meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah pedagang sampai 31 Desember 2021 sebanyak ±1.843 orang dari 32 pasar (jumlah pedagang berubah ubah seiring dengan waktu tertentu, seperti hari hari besar, terkadang jumlah pedagang bermunculan dari berbagai kalangan dan melebihi dari jumlah pedagang yang terdaftar) apalagi saat pandemi covid 19.

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan :			
	a. Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	75%	89%	100,19
	b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	33	-	0

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.025.000,- dengan capaian output 96,05 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.025.000,- dengan capaian output 96,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. **Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.35.676.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.926.000,- dengan capaian output 99,08 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

   a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp.35.676.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.926.000,- dengan capaian output 99,08 %. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %.

3. **Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 41.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.916.000,- dengan capaian output 74,49 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 41.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.916.000,- dengan capaian output 74,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

4. **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.169.924.000,- dan terealisasi sebesar Rp.169.918.200,- dengan capaian output 99,99 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.56.224.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.223.000,- dengan capaian output 99,99 %. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Belanja Barang dan Jasa

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.113.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.113.695.200,- dengan capaian output 99,99 %. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

5. **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %. Adapun kegiatannya adalah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %.

6. **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pameran Dagang Nasional

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %.

b. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan capaian output 0 %.

6. **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.135.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.134.966.000,- dengan capaian output 99,97 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.000.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp.85.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.84.966.000,- dengan capaian output 99,96 %. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai.

MENINGKATNYA JUMLAH ALAT UTTP YANG BERTANDA TERA SAH

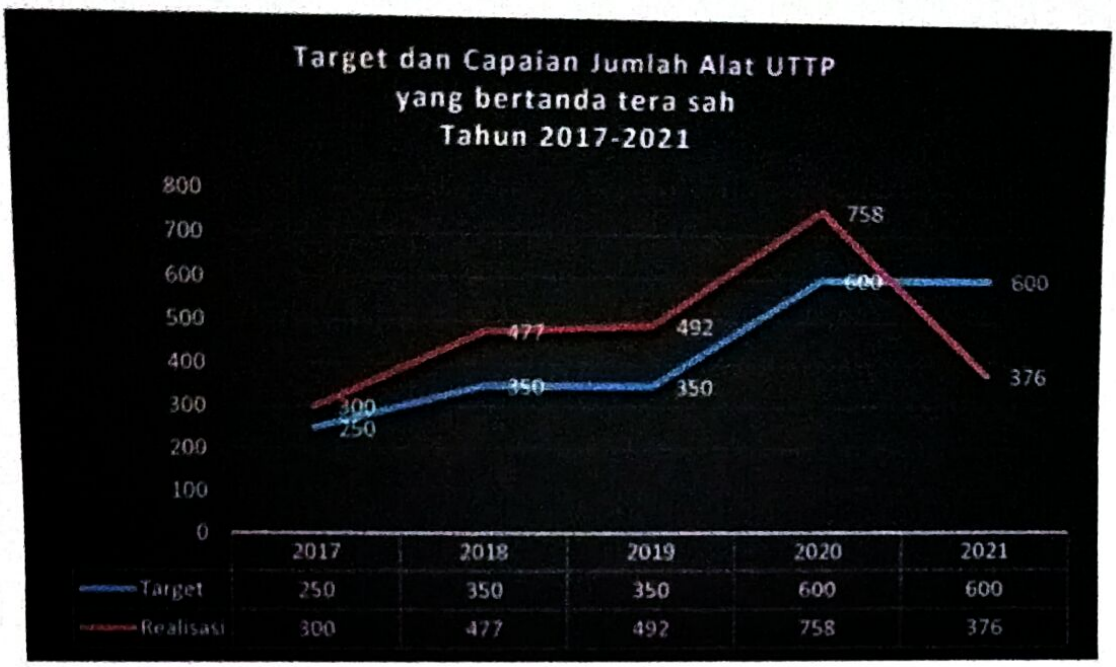

Untuk pencapaian Sasaran IKU dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan barang dan jasa beredar			
	a. Persentasi barang berstandar SNI, label dan manual kartu garansi	30%	30%	100%
	b. Persentasi UTTP yang bertanda tera sah	600 UTTP	376 UTTP	43 %

Untuk terciptanya pasar tertib ukur dan terlindunginya konsumen dan pelaku usaha dari kerugian, program/kegiatan Kemetrolgian antara lain :

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian
3. Program pengendalian kemetrologian

Dengan capaian kinerja ketiga program ini adalah tersedianya alat standar metrologi legal dan kendaraan operasional dan hasil yang ingin dicapai dalam program ini adalah dengan adanya alat UTTP pengawasan secara berkala dapat meminimalisir kekurangan takaran/ukuran yang dapat merugikan konsumen, disamping itu PAD dapat dimaksimalkan karena sudah bisa melakukan tera/tera ulang tanpa bergantung pada BSML.

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp.132.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp112.410.700,- dengan capaian output 85,16 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.355.000,- dengan capaian output 86,22 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

   b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 32.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.705.000,- dengan capaian output 74,08 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Penyidikan Metrologi Legal

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.350.700,- dengan capaian output 94,5 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Peredaran barang/produk dan jasa yang tidak layak pakai, seperti : barang/produk yang sudah kadaluarsa, kemasan dalam keadaan rusak dan lain-lain.
2. Belum optimalnya penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) oleh pelaku usaha.
3. Tidak adanya pejabat tera karena pejabatnya sehingga untuk peningkatan PAD khusus dalam retribusi pelayanan Tera/tera ulang akan mengalami penurunan

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindag KUKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang/produk yang tidak layak jual dengan memberikan sanksi.
2. Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha maupun peningkatan PAD.

Bidang Kesekretariatan

Analisa capaian kinerja yang dipaparkan di bawah ini adalah kegiatan yang berjalan atau kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 73.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.430.000,- dengan capaian output 95,06 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 23.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.100.000,- dengan capaian output 99,91 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 2.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 2.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.736.000,- dengan capaian output 78,24 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 14.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.594.000,- dengan capaian output 97,81 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 3.476.512.207,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.420.473.275,- dengan capaian output 98,38 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 3.466.362.207,- terealisasi sebesar Rp. 3.410.323.275,- dengan capaian output 98,38 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 5.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan capaian output 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.821.000,- dengan capaian output 99,28 %. Ini dapat dijelaskan bahwa program ini berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun kegiatannya adalah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.821.000,- dengan capaian output 99,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

5. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 82.664.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.200.000,- dengan capaian output 64,36 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 29.464.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan capaian output 0 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini tidak mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 53.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.200.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

6. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 741.451.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 741.448.600,- dengan capaian output 99,99 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 196.590.000,- terealisasi sebesar Rp. 196.590.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 102.003.700,- terealisasi sebesar Rp. 102.003.600,- dengan capaian output 99,99 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 4.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.900.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 15.568.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.565.000,- dengan capaian output 99,98 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 422.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 422.390.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 2.044.576.710,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.030.090.100,- dengan capaian output 99,29 %. Ini Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 47.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.062.000,- dengan capaian output 98,2 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pengadaan Mebel

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 35.324.500,- terealisasi sebesar Rp. 35.324.500,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 189.392.000,- terealisasi sebesar Rp. 189.392.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 576.020.210,- terealisasi sebesar Rp. 558.991.600,- dengan capaian output 97,04 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.199.320.000,- dengan capaian output 99,94 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

8. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 542.445.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 668.538.405,-. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari dana yang disediakan sebesar Rp.,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan capaian output 0 %.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 141.798.800,- terealisasi sebesar Rp. 141.520.805,- dengan capaian output 99,8 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 532.886.400,- terealisasi sebesar Rp. 527.017.600,- dengan capaian output 98,89 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

9. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

Pelaksanaan program ini didukung dana sebesar Rp. 278.609.433,- dan terealisasi sebesar Rp. 278.471.133,- dengan capaian output 99,95 %. Ini dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan berjalan dengan baik sesuai target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatannya sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasi atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 67.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.916.000,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 99.519.500,- terealisasi sebesar Rp. 99.519.500,- dengan capaian output 100 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Dari dana yang disediakan sebesar Rp. 111.149.933,- terealisasi sebesar Rp. 111.035.633,- dengan capaian output 99,89 %. Dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan.

Secara umum anggaran Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tiga sumber yaitu APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Koperasi dan UKM.

Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kontribusi pendapatan dibidang Perdagangan dan bidang kemertologian melalui retribusi pasar dan layanan tera/tera ulang.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Sumber	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Reribusi Pelayanan Pasar	307.500.000	127.188.900	41,36
2.	Layanan Tera/Tera Ulang	15.375.000	9.416.000	61,24
	Jumlah	**322.875.000**	**136.604.900**	**32,75**

2. Belanja dan Realisasi

Berikut Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindag KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar :

Uraian Belaja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
- Belanja Operasi	11.705.682.617	8.600.986.575	3.104.696.042	73,48
- Belanja Modal	2.088.384.643	2.069.818.033	18.566.610	99,11
Surplus/(defisit)	**11.794.067.260**	**10.670.804.608**	**3.123.262.652**	**90,48**

Dari kedua tabel di atas dapat dijelaskan bahwa surplus/(defisit) anggaran sebesar **Rp. 11.794.067.260,-** terealisasi sebesar **Rp. 10.670.804.608,-** atau **90,48 %.**

Penjabaran pengukuran kinerja dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Program dan Kegiatan	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Perkembangan modal dan tenaga kerja	Rp.484.520.000,00	Rp.455.989.895,00	94,11
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Rp.47.000.000,00	Rp.46.753.313,00	99,48
	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pendampingan Sentra	Rp.182.200.000,00	Rp.178.113.182,00	97,76
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Rp. 76.200.000,00	Rp.73.076.200,00	95,9
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra	RP. 0,00	RP. 0,00	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Studi kawasan IKM kerajinan dan kajian ekonomi pembangunan distribusi logistik teluk bone	Rp.110.000.000,00	Rp.109.210.000,00	99,28
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	pameran Indsutri kreatif, deskranasda, hari jadi sulses dan pameran industri	Rp.50.000.000,00	Rp.48.837.200,00	97,67
2	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	Jumlah Jenis Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Dikeluarkan	**Rp.0,00**	**Rp.0,00**	**0**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sitem Informasi Industri Nasional	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri	Rp.0,00	Rp.0,00	0

	(SIINAS)				
3	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi Izin yang Dikeluarkan	**Rp.102.800.000,00**	Rp.149.992.808,00	99,1
	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang terdaftar, diolah dan dianalisis dalam sistem Informasi Industri secara Lengkap dan terkini	Rp.150.631.808,00	Rp.149.992.808,00	99,57
4	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Sarana / Prasarana dalam Kondisi Baik	**Rp.50.000.000,00**	**Rp.48.025.000,00**	96,05
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya	Rp.50.000.000,00	Rp.48.025.000,00	96,05
5	**Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	**Rp.35.676.000,00**	**Rp.31.926.000,00**	**99,08**
	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.35.676.000,00	Rp.31.926.000,00	89,49
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pesetra Bimtek Pengelolaan Pasar Rakyat di Kab. Kep. Selayar	Rp.0,00	Rp.0,00	0
6	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	**Rp.41.500.000,00**	**Rp.30.916.000,00**	**74,49**
	Koordinasi dan Sikronisasi Peningkatan Aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyar	Jumlah Kecamatan yang dipantau barang kebutuhan pokok dan barang pentingnya	Rp.41.500.000,00	Rp.30.916.000,00	74,49
7	**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	**Rp.169.924.000,00**	**Rp.169.918.200,00**	**99,99**
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	Rp.56.224.000,00	Rp.56.223.000,00	**99,99**

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah barang yang dipantau dan terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Rp.113.700.000,00	Rp.113.695.200,00	99,99
8	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Jenis Pupuk dan Pestisida bersubsidi yang diawasi penggunaannya	**Rp.0,00**	**Rp.0,00**	0
	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan	Rp.0,00	Rp.0,00	0
9	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Barang/Jasa atau Komoditi Unggulan Daerah Serta Perluasan Pasar yang dikembangkan	**Rp.0,00**	**Rp.0,00**	0
	Pameran dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional Yang diikuti	Rp.0,00	Rp.0,00	0
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Mitra usaha antara pelaku usaha dengan pembeli/buyer	Rp.0,00	Rp.0,00	0
10	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	**Rp.135.000.000,00**	**Rp.134.966.000,00**	99,97
	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pameran promosi yang dilaksanakan	Rp.50.000.000,00	Rp.50.000.000,00	100
	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang digunakan	Rp.85.000.000,00	Rp.84.966.000,00	99,96
11	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang sehat Organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	**Rp.35.000.000,00**	**Rp.30.150.000,00**	86,14
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang Akuntabel	Rp.35.000.000,00	Rp.30.150.000,00	86,14
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang ber-RAT	Rp.0,00	Rp.0,00	0

12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Rp.129.157.000,00	Rp.129.157.000,00	100
	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah koperasi yang telah mendapatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp.129.157.000,00	Rp.129.157.000,00	100
13	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi Sehat	**Rp.86.998.600,00**	**Rp.86.978.600,00**	**99,97**
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Naik Kelas	Rp.86.998.600,00	Rp.86.978.600,00	99,97
14	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah UMKM yang naik kelas	**Rp.624.872.000,00**	**Rp.622.232.000,00**	**99,58**
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data UMKM yang Akurat	Rp.133.072.000,00	Rp.131.472.000,00	98,79
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah MOU yang disepakati	Rp.3.122.400.000,00	Rp.281.491.600,00	9,02
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Jumlah Sentra yang dibentuk	Rp.28.500.000,00	Rp.28.180.000,00	98,88
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pada pelatihan	Rp.181.700.000,00	Rp.181.088.400,00	99,66
15	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Alat UTTP bertanda ter SAH yang berlaku**	**Rp.132.000.000,00**	**Rp.112.410.700,00**	**85,16**
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera Ulang	Rp.70.000.000,00	Rp.60.355.000,00	86,22

	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Jumlah objek UTTP dan BDKT yang diawasi	Rp.32.000.000,00	Rp.23.705.000,00	74,08
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Pemilik UTTP dan BDKT yang dibina	Rp.30.000.000,00	Rp.28.350.700,00	94,5
16	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun (%)**	**Rp.73.040.000,00**	**Rp.69.430.000,00**	**95,06**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Rp.23.120.000,00	Rp.23.100.000,00	99,91
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Rp.2.500.000,00	Rp.2.500.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA)	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Rp.2.500.000,00	Rp.2.500.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil)	Rp.15.000.000,00	Rp.11.736.000,00	78,24
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Rp.14.920.000,00	Rp.14.594.000,00	97,81
17	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)**	**Rp.10.150.000,00**	**Rp.3.420.473.275,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.3.466.362.207,00	Rp.3.410.323.275,00	98,38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.5.000.000,00	Rp.5.000.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	Rp.5.150.000,00	Rp.5.150.000,00	100